

Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak, Inflasi, dan Defisit Anggaran Terhadap Utang Luar Negeri Indonesia

Basri Bado ¹ ✉ Wilka Jailan ² Syamsu Alam ³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk memahami akibat penerimaan pajak, inflasi, dan defisit anggaran terhadap hutang luar negeri Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari tahun 2007 hingga 2021, terutama dari website resmi BPS. Sumber data tambahan juga digunakan untuk mendukung tema penelitian. Desain penelitian yang komprehensif diharapkan dapat menghasilkan hasil yang informatif, dengan pendekatan analisis menggunakan regresi linier berganda untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, seperti penerimaan pajak, inflasi, dan defisit anggaran terhadap utang luar negeri. Persamaan regresi linier berganda digunakan untuk menggambarkan hubungan variabel-variabel tersebut dalam konteks penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki dampak signifikan dan positif terhadap utang luar negeri suatu negara. Di sisi lain, inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap utang luar negeri. Selain itu, defisit anggaran juga memberikan dampak yang signifikan dan positif terhadap tingkat utang luar negeri yang dimiliki oleh negara tersebut.

Kata Kunci: *Defisit Anggaran, Inflasi, Penerimaan Pajak, Utang Luar Negeri.*

Copyright (c) 2024 Basri Bado et al

✉ Corresponding author :

Email Address : basribado@unm.ac.id , wilkajailan63@gmail.com , alam.s@unm.ac.id

PENDAHULUAN

Tidak semua negara berkembang atau negara dunia ketiga mengalami kemiskinannya akibat kekurangan sumber daya ekonomi. Banyak dari negara-negara ini sebenarnya memiliki kekayaan sumber daya alam dan manusia yang melimpah. Namun, masalah utama terletak pada pengelolaan yang belum optimal. Sumber daya alam tersebut belum dimanfaatkan sepenuhnya karena manajemen yang tidak efisien. Salah satu penyebab utama dari pengelolaan yang buruk adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya tersebut. Selain itu, upaya untuk mengembangkan pendidikan dan bakat belum mencapai efektivitas yang diinginkan. Program pendidikan dan pelatihan yang ada belum cukup baik untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif. Untuk mencapai kemajuan, diperlukan agen pembangunan, yaitu sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Namun, upaya untuk menciptakan tenaga kerja yang demikian masih belum cukup berhasil. Secara keseluruhan, kemiskinan di negara berkembang lebih disebabkan oleh

manajemen yang buruk dan kekurangan tenaga kerja yang terampil, bukan karena kekurangan sumber daya. Upaya untuk memperbaiki pendidikan dan pelatihan masih belum cukup efektif untuk mengatasi masalah ini.

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas modal investasi yang menjadi syarat penting dalam mencapai tujuan pembangunan. Meskipun ada minat dari investor lokal dan asing dalam sektor-sektor seperti perkebunan, pertambangan, dan infrastruktur, kebijakan pemerintah yang kurang memberikan kebebasan kepada investor membuat banyak investor internasional lebih memilih berinvestasi di negara lain. UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menggariskan bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan negara dan kesejahteraan rakyat (Harahap, 2020; Tumanggor, 2022). Inflasi adalah kenaikan harga secara berkelanjutan yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi secara luas (Mulyani, 2020; Parakassi, 2018; Sarbaini & Nazaruddin, 2023). Defisit anggaran, menurut perspektif Keynesian, dapat meningkatkan PDB, kesejahteraan, dan konsumsi dengan menghasilkan lebih banyak uang yang tersedia untuk belanja karena beban pajak yang lebih rendah akibat utang yang membiayai defisit tersebut (Feranika & Haryati, 2020).

Penerimaan pajak, inflasi, dan defisit anggaran merupakan faktor-faktor penting yang mempengaruhi utang luar negeri Indonesia. Masing-masing faktor berperan dalam menentukan tingkat utang negara, yang tercermin dalam data dan tabel yang disajikan. Penerimaan pajak dan inflasi mempengaruhi utang luar negeri Indonesia, sedangkan defisit anggaran mempengaruhi berapa banyak uang Indonesia berutang. Ketiga hal ini bekerja sama untuk mempengaruhi tingkat utang Indonesia dengan melihat tabel di bawah ini.

Tabel 1. Perkembangan penerimaan Pajak, Inflasi, Defisit Anggaran dan Utang Luar Negeri Indonesia tahun 2007-2021 (miliar rupiah)

Tahun anggaran	Penerimaan Pajak (Miliar Rupiah)	Inflasi (persen)	Defisit Anggaran (Rupiah)	Utang Luar Negeri (Miliar Rupiah)
2007	1,472,964.00	6.59%	40.513	2.149.098
2008	1,638,006.00	11.6%	73.306	2.360.689
2009	1,467,018.00	2.78%	51.342	2.631.511
2010	1,715,556.00	6.96%	98.010	3.081.211
2011	1,747,748.00	3.79%	124.656	3.430.748
2012	1,965,240.00	4.30%	124.020	3.841.585
2013	2,123,154.00	8.38%	153.338	4.050.817
2014	2,293,728.00	8.36%	175.354	4.465.156
2015	3,721,251.00	3.35%	245.896	4.730.056
2016	2,569,936.00	3.02%	273.179	4.871.259
2017	2,687,056.00	3.61%	334.412	5.365.424
2018	3,037,575.00	3.13%	269.430	5.735.891
2019	3,092,279.00	2.72%	353.000	6.027.918
2020	2,746,578.00	1.68%	307.123	6.352.992
2021	2,751,664.00	1.87%	775.006	6.318.818
Rata-rata	2,335,316.00	4,81%	226.572	4.360.878

Berdasarkan data pada tabel 1, dapat diamati bahwa penerimaan pajak mengalami fluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017, penerimaan pajak mencapai 4,55%, mengalami peningkatan tajam menjadi 13,04% pada tahun 2018, dan kemudian mengalami peningkatan lebih kecil sebesar 1,80% pada tahun 2019. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2020, meskipun mengalami sedikit peningkatan kembali sebesar 0,18% pada tahun 2021. Selain itu, gambaran juga menunjukkan bahwa utang luar negeri mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Beberapa peneliti sebelumnya yaitu Astuti & Daryono Soebagyo, (2021) Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tukar dan utang luar negeri memiliki pengaruh signifikan terhadap defisit anggaran Indonesia, sementara tingkat suku bunga dan utang dalam negeri tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap defisit anggaran Indonesia (Astuti & Daryono Soebagyo, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama, inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap defisit anggaran Indonesia tahun 2006-2018, sementara defisit anggaran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap utang luar negeri (Putra, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak memiliki efek terhadap defisit anggaran di Indonesia, sementara suku bunga, investasi, dan PDB memiliki dampak negatif terhadap defisit anggaran di Indonesia (MA'RUF AH & Daryono Soebagyo, 2021). Tujuan Penelitian ini untuk memahami akibat penerimaan pajak, inflasi, dan defisit anggaran terhadap hutang luar negeri Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, di mana data dikuantifikasi menggunakan skala atau angka. Informasi kuantitatif untuk penelitian ini diperoleh melalui website resmi BPS, dengan menggunakan data statistik Indonesia dari tahun 2007 hingga 2021. Selain itu, sumber data tambahan yang relevan dengan tema penelitian juga digunakan, termasuk dokumen literatur dan sumber lainnya. Data deret waktu dari tahun 2007 hingga 2021 yang digunakan merupakan jenis data sekunder yang terpercaya. Dengan desain penelitian yang komprehensif menurut Nachmias (1978), penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan hasil yang baik dan informatif. Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan data, dengan data sekunder sebagai sumber utama. Pendekatan analisis yang diterapkan adalah analisis regresi linier berganda untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi linier berganda ini membantu dalam menggambarkan hubungan dan seberapa besar pengaruh variabel seperti penerimaan pajak, inflasi, dan defisit anggaran terhadap utang luar negeri. Persamaan regresi linier berganda digunakan untuk mengilustrasikan keterkaitan variabel-variabel tersebut dalam konteks penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan bagian utama artikel hasil penelitian dan biasanya merupakan bagian terpanjang dari suatu artikel. Hasil penelitian yang disajikan dalam bagian ini adalah hasil "bersih". Proses analisis data seperti perhitungan statistik dan proses pengujian hipotesis tidak perlu disajikan. Hanya hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis saja yang perlu dilaporkan. Tabel dan grafik dapat

digunakan untuk memperjelas penyajian hasil penelitian secara verbal. Tabel dan grafik harus diberi komentar atau dibahas.

Indonesia, yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, menawarkan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di seluruh wilayahnya, namun hanya sekitar 7.000 pulau yang dihuni. Pulau-pulau utama seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua memainkan peran penting dalam keragaman geografis dan budaya negara ini. Selain itu, terdapat pulau-pulau kecil yang terkenal seperti Bali, Karimunjawa, Gili, dan Lombok yang menjadi tujuan wisata populer bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Jakarta, ibu kota negara, terletak di Pulau Jawa yang juga merupakan pusat pemerintahan Indonesia.

Dengan koordinat garis lintang dan garis bujur yang melintasi 5° 54' 08" utara dan 11° 08' 20" selatan, serta 95° 00' 38" dan 141° 01' 20" timur, Indonesia memiliki pulau-pulau yang berdekatan dengan garis khatulistiwa. Hal ini menghasilkan durasi siang dan malam yang seimbang, yakni 12 jam pada pulau-pulau tersebut. Negara ini dibagi menjadi tiga zona waktu: WITA (Waktu Indonesia Tengah), WIB (Waktu Indonesia Barat), dan WIT (Waktu Indonesia Timur), mengingat cakupan geografis yang luas. Perbedaan waktu yang mencapai delapan jam dapat memisahkan waktu antara satu pulau dengan pulau lainnya, menambahkan kompleksitas dan kekayaan dalam keragaman waktu di Indonesia.

Deskripsi Variabel Penelitian

Peneliti akan menjelaskan hasil penelitian dengan menggunakan SPSS dalam bab ini, termasuk penjelasan data variabel dan pembahasan hasil menggunakan teknik analisis data seperti Regresi Linear Berganda, Asumsi Klasik, dan Uji Hipotesis.

Tabel 2 Perkembangan penerimaan Pajak, Inflasi, Defisit Anggaran dan Utang Luar Negeri Indonesia tahun 2015-2021 (miliar rupiah)

Tahun anggaran	Penerimaan Pajak (Miliar Rupiah)	Inflasi (persen)	Defisit Anggaran (Rupiah)	Utang Luar Negeri (Miliar Rupiah)
2007	1,472,964.00	6.59%	40.513	2.149.098
2008	1,638,006.00	11.6%	73.306	2.360.689
2009	1,467,018.00	2.78%	51.342	2.631.511
2010	1,715,556.00	6.96%	98.010	3.081.211
2011	1,747,748.00	3.79%	124.656	3.430.748
2012	1,965,240.00	4.30%	124.020	3.841.585
2013	2,123,154.00	8.38%	153.338	4.050.817
2014	2,293,728.00	8.36%	175.354	4.465.156
2015	3,721,251.00	3.35%	245.896	4.730.056
2016	2,569,936.00	3.02%	273.179	4.871.259
2017	2,687,056.00	3.61%	334.412	5.365.424
2018	3,037,575.00	3.13%	269.430	5.735.891
2019	3,092,279.00	2.72%	353.000	6.027.918
2020	2,746,578.00	1.68%	307.123	6.352.992
2021	2,751,664.00	1.87%	775.006	6.318.818
Rata-rata	2,335,316.00	4,81%	226.572	4.360878

Sumber: BPS, 2022.

Penelitian ini menggunakan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menganalisis penerimaan pajak, inflasi, defisit anggaran, dan utang luar negeri di Indonesia dalam rentang waktu tertentu. Penerimaan pajak, yang mencakup pajak penghasilan, pertambahan nilai, penjualan barang mewah, PBB, bea cukai, bea masuk, dan pajak ekspor, mengalami variasi per tahun, menunjukkan tantangan dan potensi dalam peningkatan penerimaan fiskal. Sementara itu, tren inflasi, yang diukur melalui indeks harga konsumen (IHK), menunjukkan kenaikan yang konsisten dari tahun ke tahun, mencerminkan tantangan dalam pengendalian harga barang dan jasa di pasar. Defisit anggaran, sebagai selisih antara pendapatan dan pengeluaran negara, mengalami peningkatan yang signifikan, mencerminkan tantangan dalam manajemen anggaran pemerintah. Utang luar negeri, yang meningkat dari tahun ke tahun, menjadi pilihan strategis untuk menutupi defisit anggaran, namun perlu dikelola dengan hati-hati untuk memastikan keseimbangan fiskal yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, kebijakan pinjaman luar negeri Indonesia menjadi krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas fiskal negara, dengan memperhatikan rasio hutang terhadap PDB sebagai indikator kritis keberlanjutan keuangan negara (Paramita & Panjaitan, 2018).

Tabel 1 Regresi Linier Berganda

Keterangan	TH	B	t	Signifikan (t)
(Constant)		1.493	1.243	.240
Penerimaan Pajak	+	.556	2.675	.022
Inflasi	+	-.219	-.849	.414
Defisit Anggaran	+	.469	1.648	.028
F hitung			11.579	
Signifikan F			.001 ^b	
Adjusted R square			.694	

Berdasarkan analisis regresi pada tabel 4.2, model persamaan regresi untuk variabel utang luar negeri dapat dijelaskan sebagai berikut: setiap kenaikan 1 miliar dalam penerimaan pajak akan menyebabkan peningkatan utang luar negeri sebesar 0.556 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap utang luar negeri. Sementara itu, kenaikan inflasi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap utang luar negeri, karena setiap kenaikan dalam inflasi hanya akan mengurangi utang luar negeri sebesar 0.219 miliar. Variabel inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap utang luar negeri. Di sisi lain, peningkatan defisit anggaran sebesar 1% akan mengakibatkan peningkatan utang luar negeri sebesar 1.648 miliar. Variabel defisit anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap utang luar negeri.

Sebelum melakukan analisis regresi, penting untuk memenuhi syarat-syarat statistik, salah satunya adalah uji asumsi klasik. Salah satu asumsi yang diuji adalah normalitas data, yang mengindikasikan apakah sisa atau faktor yang mempengaruhi dalam model regresi memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, yang mengharapkan data residu berdistribusi normal. Hasil dari uji normalitas akan ditentukan berdasarkan grafik plot normal, di mana data diharapkan tersebar sekitar garis diagonal dan bergerak searah dengan garis diagonal untuk memenuhi syarat normalitas. Jika data menyebar sejalan dengan garis diagonal, itu menunjukkan bahwa model regresi memenuhi syarat

normalitas. Namun, jika data tersebar menjauhi garis diagonal, itu menandakan bahwa model regresi tidak memenuhi syarat normalitas dan perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengatasi masalah tersebut sebelum melanjutkan ke analisis regresi secara keseluruhan.

Tabel 3 Uji Kolmogrov-Smirnov

One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std.Deviation	.76873318
Most Extreme Differences	Absolute	.158
	Positive	.082
	Negative	-.158
	Test Statistic	.158
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada table 3, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal karena nilai Asymp.Sig signifikan (2-tailed) sebesar 0,200, yang lebih tinggi dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai residu terstandarisasi diakui terdistribusi secara normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas dilakukan untuk memeriksa kemampuan model regresi dalam mengenali hubungan antara variabel independen. Indikator korelasi yang kuat antara variabel independen menunjukkan kualitas model regresi yang baik. Terdapat dua metode untuk mengidentifikasi multikolinearitas, yaitu dengan menggunakan nilai Tolerance dan Variance Inflation Factors (VIF). Jika nilai Tolerance ≥ 0.10 atau nilai VIF ≤ 10 , maka tidak ada indikasi multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai Tolerance ≤ 0.10 atau nilai VIF ≥ 10 , hal ini mengindikasikan adanya multikolinearitas yang perlu diperhatikan dalam analisis regresi.

Tabel 4 Uji Multikolinearitas dengan Nilai Tolerance dan VIF

Model	Model	Model
(Constant)		
Penerimaan Pajak	.631	1.586
Inflasi	.530	1.886
Defisit Anggaran	.504	1.985

Dalam analisis regresi yang dilakukan berdasarkan tabel 4, terdapat temuan penting terkait multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Hasil menunjukkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas karena semua nilai tolerance variabel independen (penerimaan pajak, inflasi, dan defisit anggaran) lebih besar

dari 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10. Hal ini menandakan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas dalam model tersebut.

Selanjutnya, uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menilai variasi yang tidak seragam pada residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Dalam pengujian ini, jika terdapat pola teratur seperti pola bergelombang pada grafik residual, maka heteroskedastisitas dapat terjadi. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat pola yang jelas atau variasi yang tidak seragam pada grafik residual, sehingga model regresi dapat dikatakan homoskedastis.

Selain itu, uji hipotesis dilakukan menggunakan uji F dan uji t untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen (penerimaan pajak, inflasi, dan defisit anggaran) terhadap variabel dependen (utang luar negeri). Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel independen secara kolektif berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan nilai F yang signifikan (11.579, $p < 0,001$). Sementara itu, uji t pada variabel independen menunjukkan bahwa penerimaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap utang luar negeri ($p = 0,022$), sementara inflasi tidak berpengaruh signifikan ($p = 0,414$) dan defisit anggaran berpengaruh positif signifikan ($p = 0,028$). Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa variabilitas variabel independen dapat menjelaskan 69,40% variabilitas variabel dependen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam analisis ini cukup kuat dan dapat diandalkan dalam menjelaskan hubungan antara variabel penerimaan pajak, inflasi, defisit anggaran, dan utang luar negeri, dengan mempertimbangkan kriteria multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan signifikansi statistik pada uji hipotesis.

Pembahasan

Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Utang Luar Negeri

Berdasarkan hasil penelitian, variabel Penerimaan Pajak memiliki nilai signifikansi $0,022 < 0,05$ dan nilai t hitung positif 2,675, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Penerimaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Utang Luar Negeri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Penerimaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan. Hasil penelitian ini menjelaskan hubungan penerimaan pajak dan hutang luar negeri terjadi dikarenakan pemerintah penerimaan pajak yang berasal dari pajak penghasilan, pertambahan nilai, penjualan barang mewah, PBB, bea cukai, bea masuk, dan pajak ekspor dipergunakan untuk membayar hutang luar negeri baik untuk pembayaran semua hutang yang dibebankan dari pendapatan GDP. Hasil penelitian ini bernilai positif artinya peningkatan penerimaan pajak akan berdampak positif terhadap hutang luar negeri, jika penerimaan pajak pemerintah meningkat hutang luar negeri akan berkurang karena pemerintah dapat memenuhi anggaran belanja negara sendiri dan melakukan pembayaran hutang luar negeri. Pengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk memacu pembangunan sesuai dengan pedoman atau kebijakan APBN.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2017) Santoso yang menemukan bahwa penerimaan pajak berdampak signifikan terhadap peningkatan utang pemerintah pusat. Penerimaan pajak tidak dapat dilepaskan dari kebijakan anggaran yang ekspansif, yang selalu menghasilkan belanja negara yang lebih tinggi daripada total penerimaan pajak (SANTOSO, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh (I Wayan Galuh Widharma 2011) bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi utang luar negeri. Metode penelitian yang digunakan

yaitu regresi linier berganda dengan pendekatan OLS. Hasil penelitian yaitu bahwa penerimaan pajak, pengeluaran pembangunan, dan kurs dollar berpengaruh secara signifikan. Adanya penerimaan pajak terhadap utang luar negeri pemerintah biasanya disertai dengan pengeluaran pembangunan. Utang luar negeri sering membuat pemerintah kurang terpacu untuk meningkatkan pendapatan dalam negerinya. Hal ini ditunjukkan dengan kekurangan dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam APBN yang selalu ditutup dengan utang, terutama utang luar negeri (Saputro & Soelistyo, 2017).

Menurut teori Ricardian yang berpendapat bahwa utang merupakan akibat dari rendahnya penerimaan pajak pada saat ini dan akan menyebabkan pemerintah menimbulkan utang di masa yang akan datang, penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk mendanai pemerintah, tetapi jumlah pajak yang diterima seringkali tidak cukup untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Setiap Negara mengharapkan agar penerimaan Negara lebih besar dari pada pengeluarannya, walaupun dilapangan kita jumpai justru sebaliknya, yaitu pengeluaran belanja suatu Negara lebih besar dari pada penerimaannya. Indonesia adalah salah satu contoh Negara, dimana pengeluarannya lebih besar dari pada penerimaannya. Oleh karena itu, besarnya penerimaan suatu Negara selalu dioptimalkan agar dapat membiayai pengeluarannya bahkan utang Negara. Umumnya sumber penerimaan setiap Negara beragam asalnya seperti Penerimaan Pajak, Sektor Pariwisata, dan kegiatan Ekspor, salah satu sumber penerimaan Negara paling berkontribusi bagi Indonesia adalah Pajak (Setiawan, 2020).

Pendapatan pajak perdagangan internasional berasal dari pendapatan bea masuk dan bea keluar, namun pendapatan negara dari sektor penerimaan pajak jumlah masih belum optimal hasilnya karena tidak selalu diimbangi dengan besarnya anggaran belanja negara yang meningkat di setiap tahunnya, penerimaan pajak yang menjadi andalan pendapatan negara diluar 2 minyak dan gas Pendapatan pajak perdagangan internasional berasal dari pendapatan bea masuk dan bea keluar, namun pendapatan ternyata masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan belanja Negara sehingga pemerintah mencari solusi dengan mencari sumber pendanaan yang lain seperti Utang Luar Negeri untuk menutupi kekuangan. Darmawan (2022) bahwa beban hutang luar negeri dapat dilihat dari Debt to GDP Ratio (DGDP). Dimana semua hutang yang dibebankan dari pendapatan GDP. Indikator dari Debt to GDP Ratio atau rasio hutang terhadap PDB (Paramita & Panjaitan, 2018) adalah batas atas maksimal dari utang luar negeri 60% dari PDB, batas aman hutang untuk negara berkembang 40%, dan batas atas tingkat hutang yang sustainable 50%. Semua transaksi yang berkaitan dengan pendapatan negara pasti ada hubungannya dengan pajak, karena setiap transaksi yang dilakukan secara resmi sesuai dengan aturan negara Indonesia diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak. Jadi salah satu sumber pendapatan negara diperoleh dari pungutan pajak. Sumber pendapatan pajak yaitu pajak penghasilan, pertambahan nilai, penjualan barang mewah, PBB, bea cukai, bea masuk, dan pajak ekspor (Setiowati, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa apabila pajak yang diterima pemerintah meningkat maka akan mengurangi jumlah hutang negara, sehingga penghasilan dari pajak akan berdampak positif atau baik terhadap hutang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang mengatakan bahwa ada hubungan atau pengaruh antara pengeluaran pemerintah dengan pajak, penelitian tersebut antara

lain oleh Bell (2012) mengatakan bahwa untuk menciptakan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran Negara, besarnya nilai pajak dan obligasi akan sangat tergantung pada posisi rekening pemerintah di bank sentral The Fed sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang tidak menimbulkan efek yang negatif bagi perekonomian (Marhaeni et al., n.d.).

Pengaruh inflasi terhadap Utang Luar Negeri

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel inflasi memiliki nilai signifikan $0,414 > 0,05$ dan t hitung positif sebesar $-0,849$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap utang luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan utang luar negeri tidak akan dipengaruhi oleh kenaikan atau penurunan laju inflasi. Karena negara-negara pengutang memperhitungkan kemampuan mereka untuk membayar pinjaman, ketika inflasi domestik kuat dan tidak terkendali, itu adalah tanda bahwa ekonomi lemah dan dapat menurunkan kepercayaan mereka. Hasil penelitian ini menjelaskan hubungan inflasi dan hutang luar negeri terjadi dikarenakan laju inflasi yang dilihat dari IHK menyebabkan kenaikan harga bahan makanan, makanan jadi, kebutuhan rumahan, Sandang, kesehatan, pendidikan dan hiburan, serta infrastruktur tidak akan mempengaruhi hutang luar negeri. Hal ini dikarenakan terjadinya inflasi menjadi bahan pertimbangan bagi pihak negara yang memberikan pinjaman, dimana kemampuan suatu negara akan dipertimbangkan secara matang tentang kesanggupan pembayaran semua hutang yang dibebankan dari pendapatan GDP. Hasil penelitian ini bernilai negatif artinya inflasi yang terlalu kuat dan tidak terkendali akan melemahkan ekonomi dan menurunkan kepercayaan kepada pihak penerima pinjaman.

Indikator inflasi sangat penting ketika menganalisis ekonomi suatu negara, terutama ketika mempertimbangkan pengaruhnya yang luas terhadap ekonomi makro agregat. Dengan kata lain, inflasi adalah keadaan dimana harga barang dan jasa secara umum meningkat. Inflasi melonjak ketika terjadi kenaikan utang luar negeri, sebagaimana terlihat dari hiperinflasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1960. Sebaliknya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, inflasi dan utang luar negeri memiliki hubungan negatif. Negara-negara pengutang memperhitungkan kemampuan mereka untuk membayar pinjaman, ketika inflasi domestik kuat dan tidak terkendali, itu adalah tanda bahwa ekonomi lemah dan dapat menurunkan kepercayaan mereka. Karena keputusan pemberian pinjaman didasarkan pada kemampuan negara untuk mengambil utang, inflasi yang berlebihan dan tidak terkendali merupakan tanda bahwa perekonomian berada dalam kondisi yang buruk dan akan menurunkan keinginan negara untuk meminjamkan (Saputra et al., 2018).

Temuan analisis ini sejalan dengan (Saputra et al., 2018) yang mengklaim bahwa ada hubungan yang signifikan dan negatif antara inflasi dan utang luar negeri. Sebab, ada kemungkinan resiko negara penerima (Indonesia) tidak akan mampu membayar utang, termasuk bunga dan pokok pinjaman. Berdasarkan hasil estimasi jangka panjang yang menyatakan inflasi memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap utang luar negeri, maka hasil dari penelitian sesuai pendapat menurut (Defrizal Saputra 2018) yaitu Selain defisit keuangan pemerintah, tingkat inflasi dalam negeri juga diduga berpengaruh terhadap volume penyerapan utang luar negeri. Ketika inflasi di dalam negeri tinggi negara donor akan

mempertimbangkan ulang keputusan untuk memberikan pinjaman ke Indonesia. Hal ini dikarenakan besarnya risiko negara penerima (Indonesia) tidak mampu untuk mengembalikan utang termasuk bunga dan pinjaman pokoknya. Sehingga ketika tingkat inflasi di dalam negeri meningkat, maka volume penyerapan utang luar negeri akan menurun.

Saat terjadi inflasi, pemerintah Indonesia membutuhkan dana yang lebih untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tersebut dan dibutuhkanlah utang luar negeri. Selain itu hasil penelitian ini berkaitan juga dengan (Saputra et al., 2018) yang menyatakan inflasi memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap utang luar negeri. Ketika inflasi di dalam negeri tinggi dan tak terkendali menandakan perekonomian tidak baik yang dapat menurunkan kepercayaan dari negara-negara debitur karena mempertimbangkan kemampuan pengembalian utang. Hal ini disebabkan besarnya risiko negara penerima (Indonesia) tidak dapat melunasi utang termasuk bunga dan pokok pinjaman. Dengan demikian, saat tingkat inflasi naik maka jumlah utang luar negeri yang terserap akan menurun.

Inflasi sendiri dapat diketahui dengan melihat indeks harga konsumen (IHK), dimana yang memiliki karakteristik kenaikan harga bahan makanan, makanan jadi, kebutuhan rumahan, Sandang, kesehatan, pendidikan dan hiburan, serta infrastruktur (Hena, 2023). Kenaikan harga yang mengakibatkan terjadinya inflasi disebabkan oleh adanya tekanan dari sisi penawaran, tekanan dari sisi permintaan, inflasi dari periode sebelumnya, dan inflasi dari dampak negara yang menjadi penentu harga (Setyawan, 2018). Terjadinya inflasi akan menjadi bahan pertimbangan tersendiri bagi pihak negara yang memberikan pinjaman, dimana kemampuan suatu negara akan dipertimbangkan secara matang tentang kesanggupan pembayaran semua hutang yang dibebankan dari pendapatan GDP (Darmawan, 2022). Hal ini tentu menyulitkan negara peminjam untuk mendapatkan pinjaman sehingga dengan terjadinya inflasi tidak akan mempengaruhi terjadinya utang luar negeri, dimana Indikator dari Debt to GDP Ratio atau rasio hutang terhadap PDB adalah batas atas maksimal dari utang luar negeri 60% dari PDP, batas aman hutang untuk negara berkembang 40%, dan batas atas tingkat hutang yang sustainable 50% (Paramita & Panjaitan, 2018).

Menurut Sari (2015) dalam teori imported inflation menjelaskan keadaan suatu Negara yang mengalami inflasi, rupiah akan terdepresiasi terhadap dolar di negara yang mengalami inflasi. Selama Indonesia masih mengandalkan barang dan bahan makanan impor, maka akan terjadi peningkatan jumlah uang yang dibutuhkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan lokal. Karena mencetak lebih banyak uang hanya akan meningkatkan inflasi, pemerintah harus meminjam uang dari negara lain untuk mengatasi masalah tersebut (Fauzi & Suhaidi, 2022).

Pada jangka panjang inflasi akan berpengaruh negatif karena ketika inflasi tinggi dan tak terkendali yang menandakan bahwasannya perekonomian kurang baik, yang menurunkan kepercayaan dari negara yang akan meminjamkan utang karena takut akan kemampuan pengembalian utang, dan pada negara yang akan meminjam pun memperhitungkan peminjaman kembali dan memilih memperbaiki perekonomian yang kurang baik saat ini dan menahan peminjaman kembali. inflasi juga berdampak negatif yang terlihat ketika perekonomian tidak stabil dari sudut inflasi yang kurang terkendali maka akan menambah biaya dalam berbagai macam aspek baik pengeluaran maupun belanja, dan

menurunkan tingkat kepercayaan dan perbaikan perekonomian diutamakan terlebih dahulu ketimbang melakukan pinjaman kembali.

Pengaruh Defisit Anggaran terhadap Utang Luar Negeri.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, variabel defisit anggaran memiliki nilai signifikansi $0,028 < 0,05$ dan nilai t-hitung positif sebesar 1,648, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Utang Luar Negeri secara parsial dipengaruhi oleh variabel defisit anggaran secara positif dan signifikan. Hal ini berimplikasi bahwa kenaikan tingkat variabel Defisit Anggaran akan mengakibatkan kenaikan tingkat utang luar negeri. Hasil penelitian ini menjelaskan hubungan deficit anggaran dan hutang luar negeri terjadi dikarenakan deficit anggaran anggaran memiliki dampak terhadap utang luar negeri. Deficit anggaran berasal dari pajak, pendapatan jasa, dan pungutan retribusi yang kemudian ditambah dari pendapatan hibah tidak dapat menanggung pengeluaran yang dilakukan pemerintah dalam APBN. Sedangkan beban pengeluaran terhadap hutang luar negeri di indikasi dengan pertimbangan kemampuan untuk pembayaran pokok hutang + bunga hutang dari hasil pendapatan ekspor, semua hutang yang dibebankan pada pendapatan ekspor, dan semua hutang yang dibebankan dari pendapatan GNP dan GDP. Hasil penelitian ini bernilai positif artinya deficit anggaran memiliki dampak yang menguntungkan bagi hutang luar negeri. Hasil penelitian ini sesuai dengan Ratang (2018) yang menyatakan Variabel defisit anggaran memiliki dampak yang cukup besar terhadap utang luar negeri dan memiliki kaitan positif dengannya. Sebab, kewajiban pembayaran utang akan diberlakukan jika defisit anggaran melebar melampaui jangka waktu yang ditentukan dan telah ditentukan. Penelitian ini di dukung oleh Udhar (2016) yang menunjukkan bahwa defisit anggaran memberikan dampak yang cukup menguntungkan bagi utang luar negeri Indonesia.

Defisit anggaran, menurut Rahardja dalam Satrianto (2014), adalah anggaran yang digunakan dan direncanakan untuk defisit karena adanya proyeksi peningkatan pengeluaran dan pengeluaran pemerintah. Ketika pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sering mengadopsi anggaran yang defisit. Defisit anggaran terjadi ketika pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan. Ada dua cara bagi pemerintah untuk membayar defisit anggaran: baik dengan menaikkan pajak atau dengan mengambil pinjaman dari luar. Menurut pandangan Keynesian, kebutuhan negara akan pinjaman luar negeri terutama disebabkan oleh ketidakseimbangan anggaran atau defisit anggaran. Oleh karena itu, anggaran pemerintah yang defisit dibiayai dengan meminjam uang dari luar. Salah satu alasan Negara meminjam uang ke luar negeri untuk menutup kesenjangan anggarannya dan menutupi kekurangan investasinya adalah karena ketidakseimbangan anggaran. Teori defisit anggaran Keynesian, yang berpendapat bahwa defisit anggaran sama dengan jumlah pendapatan ditambah pendapatan ditambah utang, menjelaskan bagaimana kaitan antara defisit anggaran dan utang luar negeri akan mempengaruhinya.

Defisit anggaran dapat diketahui dari jumlah penerimaan atau pendapatn pemerintah, pendapatan hibah, dan pengeluaran pemerintah (Nurhalimah, 2017). Dimana tujuan dari deficit anggaran adalah untuk tujuan menambah utang baru yang disebabkan karena adanya perencanaan tentang jumlah pengeluaran pemerintah yang tinggi, sedangkan jumlah pendapatan atau penerimaan pemerintah sudah diprediksikan tidak dapat mencukupi seluruh pengeluaran (Fahmi, 2021).

Alokasi dari seluruh pendapatan yang diterima pemerintah lebih kecil dari pengeluaran yang dilakukan, sehingga untuk mencukupi seluruh pengeluaran itu dilakukan hutang.

Apriani (2022) menambahkan seluruh pendapatan negara yang berasal dari pajak, pendapatan jasa, maupun pendapatan dari pungutan retribusi. Sedangkan pengeluaran pemerintah untuk membayar hutang dari pihak lain (Udhar, 2016). Apriani (2022), menyatakan pengeluaran pemerintah untuk membiayai pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, pembiayai pengembangan industri manufaktur, dan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Pembiayaan atau pengeluaran ini tentu tidak sedikit dan perlu adanya dukungan dari negara lain. Besarnya biaya atau pengeluaran pemerintah sering kali lebih besar daripada pendapatan yang diterimanya jadi memerlukan adanya hutang.

Ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah ini yang mengakibatkan terjadinya deficit anggaran yang akan berdampak pada hutang luar negeri. Apabila selisih pendapatan yang berasal dari penerimaan pemerintah ditambah dengan perolehan dana hibah lebih tinggi dari jumlah seluruh pengeluaran maka akan berdampak positif terhadap hutang luar negeri atau berkurangnya jumlah hutang keluar negeri. Tetapi jika selisih pendapatan lebih kecil dari pengeluarannya maka akan berdampak negative atau akan terjadi penambahan hutang luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi indikasi atas terjadinya deficit anggaran adalah penerimaan atau pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak, pendapatan jasa, dan pungutan retribusi yang kemudian ditambah dari pendapatan hibah tidak dapat menanggung pengeluaran yang dilakukan pemerintah dalam APBN. Beban pengeluaran terhadap hutang luar negeri di indikasi dengan pertimbangan kemampuan untuk pembayaran semua hutang yang dibebankan dari pendapatan GDP (Darmawan, 2022). Dan pertimbangan tersebut meliputi batas atas maksimal dari utang luar negeri 60% dari PDP, batas aman hutang untuk negara berkembang 40%, dan batas atas tingkat hutang yang sustainable 50% (Paramita & Panjaitan, 2018).

Defisit anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap utang luar negeri di Indonesia. Dalam rangka mempercepat pembangunan di Indonesia diperlukan investasi dan dana yang besar. Apabila dana dalam negeri tidak mencukupi, negara melakukan pilihan dengan meminjam dana ke luar negeri untuk menghindari pembebanan warga negara apabila kekurangan itu ditutup melalui penarikan pajak. Sehingga semakin defisit anggaran maka semakin bertambah utang luar negeri dalam rangka mempercepat pembangunan di Indonesia. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2007) yang menyatakan bahwa defisit anggaran memiliki pengaruh positif terhadap utang luar negeri di Indonesia. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alihodzic (2010) dimana defisit yang lebih tinggi dapat menyebabkan peningkatan hutang di Bosnia dan Herzegovina.

Di beberapa negara termasuk Indonesia, defisit pemerintah ditutupi oleh utang luar negeri. Karena itu, defisit anggaran memiliki hubungan positif dengan utang luar negeri. (Basuki & Prawoto, 2017) Hal ini sebagaimana menurut paham Keynes bahwa alasan utama pemerintah melakukan pinjaman luar negeri adalah tingginya defisit anggaran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. (Fadillah & Sutjipto, 2018) Oleh sebab itu, pinjaman tersebut digunakan untuk menutupi anggaran pemerintah yang mengalami defisit. Menurut penelitian Mahindun Dhani

(2018) yang menemukan bahwa defisit anggaran berpengaruh positif terhadap utang luar negeri, temuan penelitian ini sejalan dengan temuannya. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Nely Ayu Adriani Udhar (2016) yang menemukan bahwa utang luar negeri berpengaruh positif dan signifikan oleh defisit anggaran. Dengan kata lain, jika defisit anggaran membengkak, utang luar negeri juga akan meningkat.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap utang luar negeri, sementara inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap utang tersebut. Selain itu, defisit anggaran juga memberikan dampak yang signifikan dan positif terhadap utang luar negeri yang dimiliki oleh suatu negara. Hal ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara faktor-faktor ekonomi seperti penerimaan pajak, inflasi, defisit anggaran, dan utang luar negeri dalam konteks pengelolaan keuangan negara.

Referensi :

- Astuti, S. F., & Daryono Soebagyo, M. E. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Defisit Anggaran Indonesia Tahun 1998-2019. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fauzi, F., & Suhaidi, M. (2022). Pengaruh Defisit Anggaran, Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Utang Luar Negeri Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2010-2019. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 2167-2182.
- Feranika, A., & Haryati, D. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid 19. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 2(3), 146-152.
- Harahap, N. D. (2020). Akibat Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan Ditinjau Dari UU NO. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 5(3), 68-79.
- MA'RUF AH, C., & Daryono Soebagyo, M. E. (2021). Analisis Pengaruh Crowding Out Dan Variabel Makroekonomi Terhadap Defisit Anggaran Di Indonesia Tahun 1999-2019. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Marhaeni, A. A. I. N., Budhi, I. M. K. S., & Widharma, I. W. G. (n.d.). Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Kajian terhadap Faktor-faktor yang Berpengaruh. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 2(10), 44667.
- Mulyani, R. (2020). Inflasi dan Cara Mengatasinya dalam Islam. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1(2), 267-278.
- Parakassi, I. (2018). Inflasi dalam perspektif Islam. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2).
- Paramita, R., & Panjaitan, J. Y. (2018). Dampak Utang Pemerintah Pusat Terhadap Keberlanjutan Fiskal Indonesia Periode 1998-2017. *Jurnal Budget*, 03(01), 1-27.
- Putra, A. Y. (2021). Analisis Determinan Defisit Anggaran dan Pengaruhnya Terhadap Utang Luar Negeri Indonesia Tahun 2006-2018. Universitas Siliwangi.
- SANTOSO, B. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak, Belanja Negara, Dan Pembiayaan Anggaran Terhadap Peningkatan Utang Pemerintah Pusat Periode Tahun 1981-2016.

- Saputro, Y. D., & Soelistyo, A. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Utang Luar Negeri Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 45–59.
- Sarbaini, S., & Nazaruddin, N. (2023). Pengaruh kenaikan BBM terhadap laju inflasi di Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan*, 2(1), 25–32.
- Setiawan, B. A. (2020). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak, Pembiayaan Anggaran dan Belanja Negara Terhadap Peningkatan Utang Negara. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Tumanggor, A. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam (Analisa Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan). *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(2), 426–434.